

Analisis Keberlanjutan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Ekologi di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto

Sustainability Analysis of Community Forest Management Programs from Social, Economic, and Ecological Perspectives in Kapita Village, Bangkala District, Jeneponto Regency

Suprianto ^{a*}, Amal Said ^b, Helda Ibrahim ^c

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar ^{a,b,c}
supriantonuntunk@gmail.com, amalsaiduim@gmail.com, heldaibrahim.dty@uim-
makassar.ac.id

Abstract

Community Forest Management (PHKM) is a social forestry program that aims to improve community welfare while preserving forests. The sustainability of this program is greatly influenced by the level of community participation. This study aims to analyze the sustainability of the HKM program based on community participation. The study was conducted in Kapita Village, Bangkala District, Jeneponto Regency, from social, economic, and ecological aspects from July 24, 2025, to August 31, 2025, using a mixed methods approach with data collection techniques through measured interviews with questionnaires of 134 sample respondents who were members of forest farmer groups, in-depth interviews, and field observations. The data were analyzed using descriptive statistics, sustainability index calculations, and qualitative triangulation to strengthen the research results. The results showed that the sustainability of the social aspect reached an index of 63.7% or a score of 3.64, the economic aspect obtained an average score of 3.50, and the ecological aspect scored 3.69, all of which were in the moderately sustainable category. The Combined Sustainability Index (IGK) of the three aspects was 3.61, placing the PHKM program in the moderately sustainable category. This study concluded that PHKM has had a positive impact on social life, the economy, and environmental preservation.

Keywords: *Community Forest Management Program, Social, Economic, Ecological Perspectives*

Abstrak

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHKM) merupakan salah satu program perhutanan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Keberlanjutan program ini sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat keberlanjutan program HKM berdasarkan partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dari tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025 menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan teknik pengumpulan data melalui tehnik wawancara terukur dengan kuesioner terhadap 134 sampel responden anggota kelompok tani hutan, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, perhitungan indeks keberlanjutan, serta triangulasi kualitatif untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan aspek sosial mencapai indeks 63,7% atau skor 3,64, aspek ekonomi memperoleh skor rata-rata 3,50, dan aspek ekologi sebesar 3,69, yang seluruhnya berada pada kategori cukup berkelanjutan. Indeks Gabungan Keberlanjutan (IGK) dari ketiga aspek sebesar 3,61 menempatkan program PHKM pada kategori cukup berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PHKM telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Perspektif Sosial, Ekonomi, Ekologi

1. Pendahuluan

Hutan, sebagai ekosistem daratan yang didominasi pepohonan dan makhluk hidup lainnya, memiliki fungsi penting dalam menjaga siklus air tanah, menyediakan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi manusia, melindungi keanekaragaman hayati, serta berkontribusi kepada keseimbangan iklim global. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perubahan iklim global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan merupakan tantangan utama yang dihadapi dunia dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Data dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2023) menunjukkan bahwa deforestasi dan degradasi hutan menyumbang sekitar 11% dari total emisi gas rumah kaca global, memperparah dampak perubahan iklim.

Konteks pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community-based forest management/CBFM) dianggap sebagai salah satu pendekatan strategis yang mampu mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara berkelanjutan (Ostrom, 1990; FAO, 2021). Konsep keberlanjutan dalam pengelolaan hutan tidak hanya menekankan pada pelestarian ekologis, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (WCED, 1987). Oleh karena itu, implementasi pengelolaan hutan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan menjadi penting dalam merespons tantangan global sekaligus memberdayakan masyarakat di tingkat lokal.

Di Indonesia, upaya pelestarian hutan melalui skema *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan* (PHKM) telah menjadi bagian dari kebijakan kehutanan nasional yang bertujuan mengurangi tekanan terhadap hutan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya kelembagaan lokal, keterbatasan akses terhadap pasar dan modal, hingga rendahnya kapasitas teknis masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan (Ditjen PSKL KLHK, 2022; Safitri et al., 2020; Maryudi & Krott, 2018).

Di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Jeneponto, tekanan terhadap kawasan hutan cukup tinggi akibat alih fungsi lahan dan minimnya alternatif mata pencaharian, sehingga mendorong eksploitasi hutan yang tidak ramah lingkungan (BPS Jeneponto, 2023; Lestari & Hamzah, 2021). Selain itu, aspek sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar hutan masih menunjukkan ketimpangan, sementara upaya konservasi ekologi belum sepenuhnya berjalan optimal dalam kerangka program PHKM. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis keberlanjutan terhadap implementasi program PHKM di tingkat lokal sebagai dasar penguatan kebijakan dan pengelolaan hutan yang lebih adaptif dan partisipatif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program *Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan* sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan kelembagaan, serta sinergi antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Misalnya, penelitian oleh Nugroho et al. (2019) di Jawa Tengah menemukan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat secara langsung mampu meningkatkan hasil ekonomi rumah tangga sekaligus menurunkan tekanan terhadap kawasan hutan.

Sementara itu, studi Fitriani dan Hidayat (2021) di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa meskipun aspek sosial dan ekonomi menunjukkan kemajuan, masih terdapat kelemahan dalam pemantauan dan perlindungan ekologis jangka panjang. Di sisi lain, Andayani et al. (2020) menyoroti bahwa program PHKM seringkali mengalami stagnasi akibat kurangnya evaluasi berbasis data keberlanjutan, terutama dalam mengukur indikator ekologis seperti keanekaragaman hayati dan tutupan lahan. Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun program PHKM memiliki potensi besar dalam mewujudkan kehutanan berkelanjutan, keberhasilannya sangat bergantung pada keseimbangan antara ketiga dimensi keberlanjutan dan dukungan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal.

Penelitian lain yang relevan juga menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan nasional dan realitas lokal dalam implementasi program PHKM. Hasil studi oleh Wulandari dan Inoue (2018) menunjukkan bahwa keberlanjutan program PHKM di Lampung sangat ditentukan oleh kemampuan kelompok tani hutan dalam mengelola konflik kepentingan dan memperkuat jaringan sosial antar pemangku kepentingan.

Selain itu, penelitian oleh Yustika (2020) mengungkap bahwa keberhasilan aspek ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberhasilan ekologi, terutama ketika orientasi masyarakat lebih condong pada keuntungan jangka pendek. Temuan serupa juga disampaikan oleh Subarudi dan Herawati (2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya sistem monitoring dan evaluasi membuat program PHKM sulit mencapai tujuan ekologis secara konsisten. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun program PHKM telah diterapkan di berbagai daerah, keberlanjutannya sangat bergantung pada kapasitas adaptasi lokal, dukungan kelembagaan, dan mekanisme evaluasi yang holistik. Oleh karena itu, kajian keberlanjutan yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan ekologi secara terpadu menjadi semakin penting untuk mengukur efektivitas program PHKM di tingkat desa, seperti halnya di Desa Kapita.

Penelitian oleh Suwarno et al. (2019) di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa keberlanjutan program PHKM sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap fungsi ekologis hutan dan adanya insentif ekonomi yang jelas.

Di sisi lain, studi oleh Ramadhan dan Nugraha (2021) di Sulawesi Tenggara menemukan bahwa kelemahan dalam koordinasi antar pihak, terutama antara pemerintah daerah dan kelompok tani hutan, menjadi penghambat utama keberhasilan jangka panjang program tersebut. Penelitian oleh Rosita dan Kurniawan (2022) juga menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal, banyak program PHKM cenderung mengalami stagnasi atau bahkan gagal memberikan manfaat ekologis dan sosial yang seimbang. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa keberhasilan program PHKM sangat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi antar wilayah, karena sangat bergantung pada dinamika sosial, budaya, dan ekologis setempat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian khusus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai wilayah dengan karakteristik sosial-ekologis tersendiri untuk mengukur sejauh mana keberlanjutan program PHKM telah tercapai.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, terlihat bahwa keberhasilan program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sangat bergantung pada keterpaduan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi, serta pada kapasitas kelembagaan dan

dukungan kebijakan pemerintah. Namun, sebagian besar studi cenderung lebih menitikberatkan pada aspek sosial-ekonomi atau kelembagaan, sementara ketiga aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi masih jarang dikaji secara eksplisit dan menyeluruh dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Selain itu, terdapat keterbatasan kajian yang secara eksplisit menganalisis integrasi ketiga dimensi keberlanjutan secara holistik di tingkat lokal, khususnya di wilayah-wilayah dengan kondisi sosial-ekologis yang rentan seperti Kabupaten Jeneponto. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji keberlanjutan program PHKM di Desa Kapita dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara simultan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: *"Bagaimana keberlanjutan program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto ditinjau dari perspektif sosial, ekonomi, dan ekologi?"*

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologis dalam program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHKM) di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada Juli–September 2025 dengan populasi seluruh anggota dan pengurus kelompok tani hutan, serta melibatkan 134 responden melalui *purposive* dan *random sampling* untuk survei kuantitatif dan sekitar 10 informan kunci untuk wawancara kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengukur indikator sosial, ekonomi, dan ekologi, serta panduan wawancara untuk menggali dinamika sosial dan kelembagaan (Creswell, 2014). Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif dan melalui perhitungan indeks keberlanjutan berdasarkan metode Hardi & Zdan (1997), sedangkan data kualitatif dianalisis secara tematik dengan *open* dan *axial coding* mengacu pada Miles et al. (2014). Objek penelitian mencakup kelompok tani hutan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta aspek ekologis kawasan hutan, dengan fokus pada faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan program. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi antar dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam mendukung keberlanjutan program PHKM di tingkat lokal.

3. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Data Kuantitatif

a. Aspek Sosial

Untuk klasifikasi nilai indeks keberlanjutan aspek sosial berdasarkan kategori 0 – 25 = Rendah, 26 – 50 = Kurang, 51 – 75 = Sedang, 76 – 100 = Tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Rekapitulasi Hasil Kuesioner tentang Indeks Keberlanjutan Aspek Sosial

Indikator	Indeks (%)	Kategori
Partisipasi dalam rapat kelompok tani	9,3	Rendah
Peran dalam pengambilan keputusan	88,8	Tinggi
Kejelasan aturan pengelolaan hutan	81,7	Tinggi
Hubungan antar anggota kelompok	75,0	Sedang
Rata-rata Indeks Sosial	63,7	Sedang

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis indeks keberlanjutan aspek sosial, diperoleh nilai rata-rata sebesar 63,7% yang termasuk dalam kategori sedang atau cukup berkelanjutan. Jika dilihat per indikator, partisipasi anggota dalam rapat kelompok tani menunjukkan nilai yang paling rendah yaitu 9,3% dan masuk kategori rendah. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar anggota kurang aktif dalam menghadiri forum resmi kelompok, sehingga berpotensi melemahkan komunikasi internal dan mengurangi kualitas pengambilan keputusan bersama.

Sebaliknya, indikator peran dalam pengambilan keputusan memperoleh nilai yang sangat tinggi yaitu 88,8% dengan kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kehadiran rapat rendah, mayoritas anggota tetap merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Hal ini menjadi modal penting untuk menjaga legitimasi keputusan yang diambil serta memperkuat rasa memiliki dalam pengelolaan kelompok tani hutan.

Indikator berikutnya adalah kejelasan aturan pengelolaan hutan dengan nilai 81,7% (kategori tinggi). Capaian ini menegaskan bahwa kelompok tani hutan sudah memiliki aturan formal yang menjadi pedoman dalam pengelolaan. Namun demikian, masih terdapat anggota (36,6%) yang tidak mengetahui aturan tersebut, yang berarti sosialisasi aturan perlu ditingkatkan agar semua anggota memahami dan menjalankan aturan secara konsisten.

Sementara itu, indikator hubungan antar anggota kelompok berada pada angka 75,0% dengan kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan sosial antar anggota dinilai baik oleh seluruh responden, meskipun belum mencapai kategori sangat tinggi. Keharmonisan antar anggota menjadi salah satu kekuatan sosial yang dapat menopang keberlanjutan, namun tetap memerlukan penguatan solidaritas dalam bentuk kegiatan bersama maupun peningkatan partisipasi aktif.

Secara keseluruhan, aspek sosial dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dapat dikatakan cukup mendukung keberlanjutan. Kekuatan utama terletak pada peran anggota dalam pengambilan keputusan serta keberadaan aturan kelompok yang jelas, sementara kelemahan terbesar adalah rendahnya tingkat partisipasi dalam rapat. Oleh karena itu, strategi peningkatan keberlanjutan sosial perlu difokuskan pada upaya mendorong partisipasi aktif anggota melalui peningkatan kapasitas, motivasi, dan penyadaran akan pentingnya kehadiran dalam forum kelompok tani.

Aspek Ekonomi

Indeks Keberlanjutan Aspek Ekonomi

Untuk klasifikasi nilai indeks keberlanjutan aspek ekonomi berdasarkan kategori.

- 1,0 – 2,0 = Rendah (tidak berkelanjutan),
- 2,1 – 3,0 = Cukup (sedang),
- 3,1 – 4,0 = Sedang (cukup berkelanjutan),
- 4,1 – 5,0 = Tinggi (berkelanjutan)

Rekapitulasi indeks aspek ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Rekapitulasi Hasil Kuesioner tentang Indeks Keberlanjutan Aspek Ekonomi

Indikator	Skor (s)	Kategori
Pendapatan hasil hutan	4,7	berkelanjutan
Akses Pasar	4	cukup berkelanjutan
Pelatihan/ Bantuan Modal	1,5	tidak berkelanjutan
Keberagaman mata pencaharian	4,3	berkelanjutan
Rata-rata Indeks Sosial	3,5	Cukup berkelanjutan

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, rekapitulasi indeks keberlanjutan aspek ekonomi anggota KTH menunjukkan variasi tingkat keberlanjutan pada masing-masing indikator. Indikator pendapatan hasil hutan memiliki skor 4,7, menunjukkan kategori berkelanjutan, yang berarti sebagian besar anggota mengalami peningkatan pendapatan sejak bergabung dengan program PHKM. Untuk indikator akses pasar, skor sebesar 4,0 menandakan kategori cukup berkelanjutan, karena seluruh anggota memiliki akses pasar, meskipun terbatas pada pedagang pengumpul.

Sementara itu, indikator pelatihan atau bantuan modal memiliki skor 1,5, termasuk kategori tidak berkelanjutan, yang mencerminkan bahwa sebagian besar anggota belum menerima pelatihan atau bantuan modal secara merata, dan sebagian bantuan yang diberikan belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sarana dan infrastruktur. Indikator keberagaman mata pencaharian memperoleh skor 4,3, masuk kategori berkelanjutan, menunjukkan bahwa hampir seluruh anggota merasakan pengaruh positif dari program PHKM terhadap diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan perhitungan rata-rata keempat indikator, diperoleh indeks keberlanjutan ekonomi sebesar 3,6 yang masuk kategori cukup berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program PHKM memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi anggota KTH, meskipun ada kebutuhan untuk memperbaiki distribusi pelatihan dan pemanfaatan bantuan modal agar semua anggota dapat memperoleh manfaat yang optimal.

Aspek Ekologi

Indeks Keberlanjutan Aspek Ekologi

Tabel. 27. Rekapitulasi Hasil Kuesioner tentang Indeks Keberlanjutan Aspek Ekologi

Indikator	Skor (I)	Kategori
Pengetahuan tentang upaya konservasi	4,01	Berkelanjutan
Kondisi tutupan hutan	4,09	Berkelanjutan
Pemantauan kondisi hutan	2,52	Kurang Berkelanjutan
Praktik penebangan liar	4,12	Berkelanjutan
Rata-rata	3,69	Cukup berkelanjutan

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar indikator aspek ekologi memiliki skor berkelanjutan, seperti pengetahuan konservasi, kondisi tutupan hutan, dan praktik penebangan liar.

Indikator yang masih perlu perhatian adalah pemantauan kondisi hutan, yang berada pada kategori kurang berkelanjutan, karena sebagian besar anggota kelompok tani belum melakukan pemantauan rutin dan terdokumentasi.

Dengan rata-rata skor 3,69, secara keseluruhan Aspek Ekologi di kawasan hutan kemasyarakatan ini termasuk kategori Cukup Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan secara umum sudah berjalan baik, namun masih perlu penguatan pada sistem monitoring dan pemantauan hutan agar keberlanjutan ekologi lebih optimal

Indeks Gabungan Keberlanjutan dari Aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Untuk menilai tingkat keberlanjutan program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHKM) secara menyeluruh, perlu dilakukan penghitungan Indeks Gabungan Keberlanjutan (IGK) yang mencakup ketiga aspek utama, yaitu Sosial, Ekonomi, dan Ekologi. Indeks gabungan ini diperoleh dari rata-rata skor indeks masing-masing aspek, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai keberlanjutan program secara keseluruhan. Tabel berikut menyajikan ringkasan skor indeks dan kategori tiap aspek beserta nilai rata-rata yang menjadi Indeks Gabungan Keberlanjutan.

Berikut tabel ringkasan Indeks Gabungan:

Tabel. 28. Rekapitulasi Hasil Kuesioner tentang Gabungan Keberlanjutan Aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Aspek	Skor Indeks	Kategori
Sosial	3,64	Cukup Berkelanjutan
Ekonomi	3,50	Cukup Berkelanjutan
Ekologi	3,69	Cukup Berkelanjutan
Rata-rata / IGK	3,61	Cukup Berkelanjutan

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Tabel ringkasan ini menyajikan skor indeks dan kategori keberlanjutan untuk ketiga aspek utama program PHKM, yaitu Sosial, Ekonomi, dan Ekologi, beserta nilai rata-rata yang membentuk Indeks Gabungan Keberlanjutan (IGK). Berdasarkan hasil perhitungan, aspek Sosial memperoleh skor indeks 3,64, aspek Ekonomi 3,50, dan aspek Ekologi 3,69, semuanya termasuk kategori Cukup Berkelanjutan. Nilai rata-rata dari ketiga aspek tersebut adalah 3,61, yang juga menegaskan bahwa secara keseluruhan, keberlanjutan program PHKM di wilayah penelitian termasuk kategori Cukup Berkelanjutan.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun aspek ekonomi relatif lebih stabil, aspek sosial dan ekologi masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pemantauan hutan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan HHBK yang sesuai aturan. Dengan menggunakan Indeks Gabungan Keberlanjutan, kondisi program dapat dinilai secara menyeluruh, sehingga pihak pengelola dan pemangku kepentingan dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan keberlanjutan program di masa mendatang.

Analisis Data Kualitatif

a. Kondisi Sosial

1. Keterlibatan Masyarakat

Seluruh anggota masyarakat pada dasarnya aktif terlibat dalam pengelolaan kawasan HKm, terutama pada musim hujan (penanaman) dan musim kemarau (pemeliharaan serta panen hasil hutan bukan kayu/HHBK seperti jambu mete). Bentuk partisipasi lebih dominan pada aktivitas teknis, seperti penanaman, pemeliharaan mandiri lahan, serta perlindungan lahan masing-masing. Namun, kegiatan kelembagaan berupa rapat bersama jarang dilakukan, kecuali ada fasilitasi langsung dari penyuluh lapangan.

Partisipasi masyarakat juga menunjukkan adanya pembagian peran berbasis gender. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan fisik seperti pembersihan dan pemeliharaan lahan, sementara perempuan berperan dalam kegiatan yang lebih ringan, terutama pada saat panen, dengan dukungan transportasi sederhana seperti motor ojek. Motivasi utama partisipasi masyarakat adalah untuk menambah pendapatan keluarga, sehingga faktor ekonomi menjadi pendorong terbesar dalam keberlanjutan keterlibatan mereka.

Tingginya motivasi ekonomi mendorong anggota untuk tetap menjaga komitmen dalam pengelolaan lahan, meskipun terkadang harus mengorbankan waktu untuk menghadiri rapat kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program HKm sangat dipengaruhi oleh manfaat langsung yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, peran HHBK seperti jambu mete dan hasil tanaman kehutanan lainnya menjadi faktor penting dalam mempertahankan keterlibatan anggota.

Selain itu, adanya perbedaan tingkat keterlibatan antara laki-laki dan perempuan juga memberikan gambaran tentang pentingnya strategi pemberdayaan berbasis gender. Jika perempuan dapat lebih difasilitasi, terutama dalam akses terhadap informasi, pelatihan, dan kelembagaan, maka partisipasi mereka berpotensi meningkat. Hal ini akan memperkuat kohesi sosial serta meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan secara kolektif.

2. Tantangan Sosial

Beberapa tantangan sosial yang dihadapi antara lain:

- Konflik internal, terutama terkait penguasaan lahan warisan yang terkadang memicu perbedaan pandangan antar anggota.
- Rendahnya kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok, umumnya disebabkan oleh kesibukan mengurus lahan sendiri, jarak tempuh ke lokasi pertemuan, serta keterbatasan biaya transportasi.
- Kendala partisipasi yang bersumber dari keterbatasan waktu, faktor ekonomi, dan minimnya manfaat langsung dari lahan yang sebagian besar telah ditanami tanaman kehutanan.

Dalam kondisi tersebut, penyuluh lapangan berperan penting dengan memberikan pendampingan secara fleksibel, melakukan pendekatan personal, serta memberikan edukasi mengenai manfaat jangka panjang program HKm.

Tantangan sosial yang muncul ini pada dasarnya bersifat laten, karena meskipun tidak sampai menimbulkan konflik besar, namun berpotensi mengurangi kohesi kelompok jika tidak segera diatasi. Minimnya partisipasi dalam forum rapat dan rendahnya intensitas komunikasi antar anggota juga memperlemah ikatan kelembagaan, sehingga pengambilan keputusan sering kali tidak representatif.

Selain itu, rendahnya kesadaran akan manfaat jangka panjang hutan menyebabkan sebagian anggota lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka pendek. Jika tidak ada intervensi yang tepat, situasi ini dapat memengaruhi keberlanjutan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan pemahaman kolektif, serta insentif yang seimbang agar tantangan sosial tidak menjadi hambatan besar bagi keberlangsungan program HKM

3. Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam kelompok tani hutan pada umumnya masih terpusat pada ketua kelompok, mengingat rapat bersama jarang dilakukan. Walaupun seluruh anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dinamika diskusi sering kali tidak berjalan optimal. Apabila muncul perbedaan pandangan atau konflik, penyuluh biasanya bertindak sebagai mediator untuk menjaga agar keputusan tetap dapat diterima oleh semua pihak.

Pola pengambilan keputusan yang cenderung top-down ini menunjukkan bahwa aspek demokratisasi kelembagaan masih terbatas. Hal ini dapat berdampak pada turunnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dari anggota terhadap program HKM, karena sebagian besar keputusan tidak melalui proses musyawarah yang terbuka. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memengaruhi tingkat partisipasi dan kepercayaan anggota terhadap pengurus.

Peran penyuluh dalam memediasi perbedaan pendapat menjadi faktor kunci dalam menjaga keharmonisan kelompok. Namun, jika ketergantungan pada penyuluh terlalu tinggi, maka kelembagaan kelompok akan kurang mandiri. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan internal yang lebih partisipatif, transparan, dan inklusif, sehingga anggota memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan arah kebijakan kelompok.

b. Dampak Ekonomi

1. Perubahan Pendapatan

Secara umum, pendapatan anggota kelompok tani hutan dapat dikatakan stabil meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena sebelum adanya program PHKM, masyarakat telah terbiasa memanfaatkan hasil hutan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya skema resmi, pemanfaatan tersebut kemudian dilegalkan, sehingga perubahan yang dirasakan lebih pada kepastian akses ketimbang peningkatan pendapatan secara nyata.

Faktor utama yang memengaruhi perbedaan tingkat pendapatan antaranggota adalah luas dan produktivitas lahan yang dimiliki serta kemampuan individu dalam mengakses pasar. Anggota yang memiliki lahan lebih luas dan mampu mengelola hasil hutan dengan baik cenderung mendapatkan tambahan penghasilan lebih tinggi. Sebaliknya, bagi anggota dengan lahan terbatas atau tidak memiliki akses pemasaran yang baik, manfaat ekonomi dari program masih dirasakan kecil.

Selain faktor lahan dan produktivitas, tingkat pendapatan juga sangat dipengaruhi oleh variasi musim dan harga pasar yang fluktuatif. Misalnya, saat harga jagung dan jambu mete turun, keuntungan anggota juga menurun drastis meski hasil panen cukup melimpah. Situasi ini membuat penghasilan masyarakat tidak stabil, sehingga pendapatan dari PHKM belum sepenuhnya dapat diandalkan sebagai sumber utama.

Lebih jauh, stabilitas pendapatan juga dipengaruhi oleh keterbatasan dalam pengolahan pascapanen. Produk hasil hutan yang dijual umumnya masih dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya rendah. Minimnya akses ke teknologi

pengolahan membuat masyarakat hanya memperoleh keuntungan kecil, sementara rantai distribusi dan pedagang luar lebih dominan menikmati hasil.

2. Sumber Pendapatan

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan kelompok berasal dari hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya jagung dan jambu mete. Kedua komoditas ini sudah menjadi bagian penting dalam sistem pertanian masyarakat, sehingga keberadaannya di dalam kawasan hutan memperkuat basis ekonomi rumah tangga. Jagung lebih berperan sebagai sumber pangan sekaligus pendapatan cepat, sedangkan jambu mete dipandang sebagai investasi jangka menengah.

Meski demikian, ketergantungan masyarakat terhadap usaha di luar hutan masih cukup tinggi. Sebagian besar anggota memiliki lahan pertanian non-hutan atau usaha lain seperti perdagangan kecil, ojek, dan buruh tani. Diversifikasi pendapatan ini menunjukkan bahwa hasil hutan belum menjadi sumber utama ekonomi keluarga, melainkan hanya tambahan yang menopang kebutuhan. Dengan kata lain, kontribusi PHKM masih bersifat komplementer terhadap sumber pendapatan utama Masyarakat

Meskipun jagung dan jambu mete merupakan komoditas utama, terdapat pula hasil hutan lain yang sebenarnya berpotensi memberikan kontribusi ekonomi, seperti kayu bakar, madu hutan, dan tanaman hortikultura yang ditanam di sela-sela lahan. Namun, pemanfaatan komoditas ini masih bersifat sporadis dan belum dikembangkan secara maksimal sebagai sumber pendapatan tambahan yang berkelanjutan.

Hal lain yang menarik adalah adanya kecenderungan generasi muda lebih memilih bekerja di sektor non-hutan seperti buruh bangunan atau merantau ke kota. Akibatnya, ketergantungan pada lahan hutan lebih banyak dirasakan oleh generasi tua yang memang terbatas dalam pilihan pekerjaan. Kondisi ini mencerminkan bahwa keberlanjutan manfaat ekonomi PHKM perlu memperhatikan strategi regenerasi agar anak muda tertarik kembali pada pengelolaan hutan.

3. Dukungan Pelatihan dan Modal

Program pelatihan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga pendukung cukup sering dilakukan, namun terdapat kendala dalam penyebaran manfaat. Biasanya hanya ketua kelompok yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut, sementara hasil pengetahuan yang diperoleh jarang didiseminasikan secara menyeluruh kepada anggota. Hal ini mengakibatkan kapasitas individu anggota tetap rendah dan belum terjadi peningkatan kemampuan kolektif dalam mengelola hutan secara lebih produktif.

Selain itu, bantuan modal yang telah disalurkan belum berjalan efektif sesuai dengan tujuan awal. Beberapa contoh menunjukkan adanya penyalahgunaan maupun pemanfaatan yang tidak optimal, seperti alat pemecah jambu mete yang belum bisa difungsikan, motor angkut hasil hutan yang hanya digunakan ketua, hingga adanya praktik menjual bantuan yang diberikan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam distribusi bantuan agar manfaat dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh anggota.

Keterbatasan penyerapan manfaat pelatihan juga dipengaruhi oleh pola komunikasi internal kelompok yang masih lemah. Tidak adanya mekanisme rutin untuk berbagi ilmu menyebabkan anggota yang tidak mengikuti pelatihan tidak memperoleh tambahan wawasan. Padahal, dengan penyebaran informasi yang merata, kapasitas kelompok bisa meningkat secara kolektif dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan usaha.

Sementara itu, masalah bantuan modal juga dipengaruhi oleh kurangnya perencanaan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Bantuan sering kali datang dalam bentuk paket program dari pemerintah yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal. Akibatnya, sebagian bantuan tidak dimanfaatkan optimal bahkan ada yang dijual kembali. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan bantuan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

c. Kondisi Ekologis

1. Kondisi Hutan

Peningkatan tutupan hutan setelah adanya PHKM juga berdampak pada perubahan lanskap kawasan. Area yang sebelumnya terbuka kini mulai tertutup kembali dengan vegetasi sekunder maupun tanaman kehutanan yang ditanam masyarakat. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap keseimbangan ekosistem, termasuk ketersediaan habitat satwa liar yang sebelumnya mulai berkurang. Beberapa warga bahkan melaporkan munculnya kembali jenis burung dan satwa kecil yang menandakan ekosistem mulai pulih.

Selain itu, keberadaan vegetasi yang semakin rapat berfungsi sebagai penahan erosi dan banjir di musim hujan. Akar tanaman mampu mengikat tanah sehingga longsor lebih jarang terjadi. Air hujan juga lebih banyak terserap ke dalam tanah, yang kemudian membantu menjaga ketersediaan air tanah di musim kemarau. Dengan demikian, keberhasilan program PHKM tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga menjaga fungsi ekologis yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Tidak kalah penting, keberlanjutan kondisi hutan ini juga dipengaruhi oleh adanya pengawasan dan pendampingan dari penyuluh maupun lembaga terkait. Walaupun masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum, kontrol eksternal tetap dibutuhkan agar tidak ada peluang bagi individu yang mencoba melanggar aturan. Keterlibatan tokoh adat dan pemerintah desa dalam menjaga komitmen bersama juga memperkuat sistem pengelolaan berbasis masyarakat, sehingga potensi kerusakan hutan dapat diminimalisasi secara berkelanjutan.

Selain manfaat ekologis yang nyata, kondisi hutan yang semakin baik juga menciptakan peluang bagi pengembangan usaha berkelanjutan berbasis ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Beberapa anggota kelompok tani melihat potensi ini sebagai tambahan penghasilan tanpa harus merusak hutan. Misalnya, dengan memanfaatkan hasil madu hutan, tanaman obat, atau mengembangkan jalur wisata edukasi yang menampilkan praktik konservasi. Dengan demikian, perbaikan tutupan hutan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga membuka jalan bagi diversifikasi sumber ekonomi masyarakat secara ramah lingkungan.

2. Konservasi

Kegiatan konservasi di Desa Kapita dilakukan melalui penanaman kembali atau rehabilitasi hutan dengan berbagai jenis tanaman seperti jati putih, mahoni, sukun, dan jambu mete. Pemilihan jenis tanaman ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki tutupan lahan, tetapi juga memberikan manfaat ganda, yaitu nilai ekonomi dari hasil hutan sekaligus fungsi ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan adanya penanaman beragam jenis pohon, kawasan hutan menjadi lebih produktif dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Selain itu, kegiatan konservasi juga difokuskan pada pelestarian sumber air. Salah satu bentuk nyata adalah penegakan larangan menebang pohon di sekitar mata air, yang dipatuhi oleh sebagian besar anggota kelompok. Langkah ini penting untuk

mempertahankan kualitas dan ketersediaan air, mengingat sumber air merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat sekitar. Perlindungan vegetasi di sekitar mata air juga berperan dalam mencegah erosi tanah, memperlancar infiltrasi, serta menjaga aliran air tetap stabil sepanjang musim.

Upaya konservasi yang dilakukan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi ekologis hutan. Meskipun sebagian besar motivasi utama keterlibatan masyarakat dalam program PHKM adalah faktor ekonomi, kegiatan konservasi tetap berjalan karena adanya aturan kelompok, peran penyuluh, serta kesadaran akan manfaat jangka panjang. Dengan demikian, strategi konservasi di Kapita tidak hanya memperkuat aspek ekologi, tetapi juga mendukung keberlanjutan program melalui keterpaduan antara kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun kegiatan konservasi telah berjalan dengan cukup baik, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan bibit pohon yang sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa jenis tanaman cepat tumbuh seperti jati putih dan mahoni cukup tersedia, tetapi bibit tanaman lokal atau buah-buahan yang bernilai ekonomi sering kali sulit diperoleh. Hal ini membuat kegiatan reboisasi belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberagaman hayati.

Selain itu, tantangan lain adalah rendahnya tingkat perawatan terhadap pohon yang sudah ditanam. Banyak pohon yang mati akibat kekeringan pada musim kemarau, serangan hama, atau karena tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin. Keterbatasan waktu dan tenaga anggota kelompok tani, yang lebih banyak difokuskan pada lahan pertanian pribadi, menjadi faktor penghambat utama. Demikian pula, meskipun aturan larangan menebang di sekitar mata air diterapkan, masih ada sebagian kecil masyarakat yang melanggar karena kebutuhan ekonomi mendesak.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya konservasi memerlukan pengawasan yang konsisten dan dukungan kelembagaan yang lebih kuat.

Untuk memperkuat upaya konservasi di Desa Kapita, salah satu strategi utama adalah peningkatan ketersediaan bibit tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekologi setempat. Pemerintah daerah bersama penyuluh dapat berkolaborasi dengan lembaga kehutanan maupun perguruan tinggi untuk menyediakan bibit unggul, baik berupa tanaman kayu-kayuan maupun buah-buahan lokal yang bernilai ekonomi. Dengan begitu, program konservasi tidak hanya memperbaiki tutupan lahan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

Strategi lain adalah peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat melalui pelatihan teknis terkait reboisasi, perawatan tanaman, dan pengendalian hama. Pelatihan ini sebaiknya tidak hanya diikuti oleh ketua kelompok, melainkan seluruh anggota, agar pengetahuan dapat langsung diterapkan di lapangan. Selain itu, dukungan insentif atau penghargaan bagi kelompok yang berhasil menjaga kawasan konservasi dapat menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam pemeliharaan pohon dan perlindungan sumber air.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan kelompok tani hutan juga sangat penting. Mekanisme monitoring dan evaluasi secara partisipatif dapat diterapkan, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab menjaga blok lahan tertentu. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap hutan dan mendorong partisipasi yang lebih merata. Kearifan lokal, seperti larangan adat menebang pohon

tertentu atau menjaga kawasan mata air, juga dapat diintegrasikan dalam aturan kelompok sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Terakhir, sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal perlu terus diperkuat. Kolaborasi lintas pihak akan membantu memastikan bahwa program konservasi berjalan secara berkelanjutan, baik dari sisi pendanaan, pendampingan, maupun penegakan aturan. Dengan demikian, strategi penguatan konservasi dapat menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHKM) di Kapita

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap kawasan hutan dalam program PHKM di Desa Kapita masih bersifat individual. Setiap anggota kelompok cenderung fokus menjaga lahannya sendiri karena berkaitan langsung dengan kepentingan pribadi, terutama untuk menghindari kerugian akibat pencurian hasil, perambahan, atau kerusakan tanaman. Pola pengawasan seperti ini membuat keamanan hutan relatif terjaga pada skala kecil, tetapi tidak menjangkau kawasan secara menyeluruh.

Ketiadaan patroli rutin yang dilakukan secara kelompok menyebabkan lemahnya kontrol terhadap wilayah hutan secara kolektif. Hal ini berpotensi menimbulkan celah bagi pihak luar yang ingin melakukan penebangan liar atau perambahan di area yang jauh dari lahan garapan masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan kolektif membuat kesadaran akan pentingnya menjaga hutan sebagai aset bersama masih belum terbentuk secara utuh.

Meskipun demikian, kehadiran penyuluh kehutanan berperan penting dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pengawasan bersama. Penyuluh sering menekankan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari keberhasilan individu menjaga lahannya, tetapi juga dari terjaganya kondisi hutan secara keseluruhan. Untuk itu, ke depan perlu dirancang sistem patroli berbasis kelompok yang terjadwal, agar tanggung jawab pengawasan dapat dibagi rata antaranggota dan rasa kebersamaan dalam menjaga hutan semakin kuat.

Selain patroli lapangan, pengawasan juga dapat diperkuat melalui penerapan aturan internal yang disepakati bersama. Misalnya, sanksi sosial atau denda bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran atau membiarkan lahannya menjadi pintu masuk perambahan. Dengan pengawasan kolektif yang terstruktur, keberlanjutan program PHKM diharapkan lebih terjamin.

Penguatan pengawasan kawasan hutan dapat dilakukan melalui pembentukan tim patroli kelompok tani hutan (KTH). Tim tersebut dirancang bekerja secara terjadwal dan bergilir sehingga tanggung jawab pengawasan tidak hanya bertumpu pada kesadaran individu, melainkan terbagi secara kolektif di antara anggota. Kegiatan patroli difokuskan pada titik-titik yang dianggap rawan perambahan, antara lain akses jalan setapak, batas kawasan hutan, serta area sekitar sumber air..

Selain patroli rutin, pengawasan juga bisa didukung dengan pemanfaatan teknologi sederhana seperti penggunaan telepon seluler untuk komunikasi cepat antaranggota ketika terjadi gangguan. Bahkan, dengan dukungan pemerintah desa atau LSM, dapat dipertimbangkan penggunaan GPS tracking atau aplikasi berbasis komunitas untuk melaporkan kondisi lapangan. Dengan cara ini, pengawasan akan lebih efisien dan terkoordinasi.

Keterlibatan pemerintah desa, penyuluh kehutanan, dan aparat terkait juga penting dalam memperkuat legitimasi pengawasan. Pemerintah dapat mendukung melalui peraturan desa (Perdes) yang mengatur tata kelola kawasan hutan, termasuk

sanksi tegas bagi pelanggar. Dengan adanya aturan formal yang selaras dengan kesepakatan kelompok, rasa tanggung jawab kolektif akan meningkat.

Terakhir, strategi pengawasan perlu dipadukan dengan kearifan lokal dan nilai sosial masyarakat. Misalnya, melalui pendekatan sanksi sosial, musyawarah adat, atau simbol budaya yang memperkuat norma larangan merusak hutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kontrol sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki bahwa hutan adalah warisan bersama yang harus dijaga untuk anak cucu

d. Integrasi Aspek Keberlanjutan

1. Keseimbangan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi

Keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan ekologi merupakan kunci keberlanjutan program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHKM). Pada tahap ini, aspek ekologi menunjukkan capaian paling nyata dengan meningkatnya tutupan vegetasi dibandingkan kondisi awal kawasan yang gundul. Hal ini menandakan bahwa intervensi program berhasil menekan laju perambahan dan mengembalikan fungsi ekologis hutan. Namun, aspek sosial dan ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya partisipasi aktif anggota dalam rapat kelompok, keterbatasan akses pasar, serta distribusi manfaat yang belum merata.

Oleh karena itu, penguatan keseimbangan perlu diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dengan mekanisme yang adaptif. Jadwal kegiatan yang fleksibel, pemberian motivasi berupa insentif kecil, serta penyediaan fasilitas transportasi sederhana dapat mendorong keterlibatan anggota yang selama ini terbatas oleh faktor waktu dan biaya. Pada sisi ekonomi, diversifikasi produk hasil hutan serta pelatihan pengolahan pascapanen bernilai tambah sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian kelompok. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara proporsional, keberlanjutan PHKM tidak hanya terjaga dari sisi ekologi, tetapi juga mampu memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Integrasi aspek keberlanjutan juga memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendukung lainnya. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memperluas akses pasar dan memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan melalui regulasi maupun bantuan teknis. Sementara itu, penyuluh lapangan dapat terus mendampingi masyarakat dengan pendekatan partisipatif agar anggota merasa memiliki program secara bersama-sama. Dukungan dari lembaga pendidikan atau LSM juga penting dalam memberikan pelatihan inovatif berbasis teknologi tepat guna. Dengan kolaborasi multipihak ini, integrasi sosial, ekonomi, dan ekologi dapat berjalan lebih seimbang serta menghasilkan dampak jangka panjang yang berkelanjutan

Arah strategis integrasi keberlanjutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHKM) perlu ditempuh melalui tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka pendek, upaya difokuskan pada penguatan partisipasi masyarakat melalui penjadwalan kegiatan yang lebih fleksibel, pemberian insentif kecil, serta peningkatan komunikasi antaranggota kelompok. Dari sisi ekonomi, strategi diarahkan pada diversifikasi hasil hutan non-kayu seperti madu, sukun, dan jambu mete serta memperluas akses pasar melalui kerja sama dengan koperasi lokal atau pemanfaatan platform digital. Sementara dari aspek ekologi, langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kegiatan konservasi melalui reboisasi lanjutan, perlindungan sumber air, serta pengawasan partisipatif berbasis kesadaran masyarakat.

Pada tahap jangka menengah, fokus utama adalah memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan, membangun transparansi dalam pengelolaan bantuan, serta mendorong pembagian manfaat yang lebih merata di antara anggota. Dari aspek ekonomi, strategi yang dapat dikembangkan adalah pendirian unit usaha bersama, seperti koperasi hutan atau BUMDes, untuk mengolah hasil hutan menjadi produk bernilai tambah, misalnya olahan mete dan jagung organik. Sementara itu, dari aspek ekologi, diperlukan penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi sederhana seperti GIS atau drone komunitas, serta mempertegas aturan lokal dalam menjaga kawasan konservasi agar manfaat ekologis tetap terjaga.

Arahan strategis diarahkan untuk mewujudkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan pemuda dan perempuan diharapkan semakin kuat sehingga regenerasi pengelolaan dapat berlangsung secara dinamis. Dari sisi ekonomi, strategi diarahkan untuk mencapai kemandirian finansial kelompok tani hutan dengan memperluas akses modal berkelanjutan, menjalin kemitraan dengan industri, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam sebagai sumber tambahan pendapatan. Pada saat yang sama, aspek ekologi difokuskan pada penjaminan keberlanjutan fungsi ekosistem melalui penetapan kawasan lindung komunitas, pemeliharaan keanekaragaman hayati, dan upaya menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat di sekitarnya

2. Kendala Keberlanjutan

Kendala keberlanjutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) masih cukup menonjol terutama pada aspek partisipasi masyarakat. Sebagian besar anggota cenderung lebih fokus pada pekerjaan di luar kawasan HKm, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan kelompok relatif rendah. Selain itu, biaya transportasi menuju lokasi hutan seringkali menjadi hambatan, ditambah dengan kelembagaan kelompok yang masih terbatas dalam hal koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran. Kondisi ini menyebabkan kegiatan kelompok lebih sering berjalan ketika difasilitasi pihak luar, seperti penyuluh atau lembaga pendamping.

Di sisi lain, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Tekanan pembukaan lahan baru dari masyarakat sekitar yang belum tergabung dalam kelompok serta praktik konversi lahan untuk pertanian intensif menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kawasan hutan. Fluktuasi harga pasar hasil hutan, khususnya komoditas seperti jagung dan jambu mete, turut memperlemah motivasi anggota karena pendapatan yang diperoleh tidak selalu stabil. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan PHKM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan dan partisipasi, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika pasar dan tekanan lingkungan eksternal yang harus diantisipasi secara sistematis.

Kendala keberlanjutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) masih cukup menonjol terutama pada aspek partisipasi masyarakat. Sebagian besar anggota cenderung lebih fokus pada pekerjaan di luar kawasan HKm, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan kelompok relatif rendah. Selain itu, biaya transportasi menuju lokasi hutan seringkali menjadi hambatan, ditambah dengan kelembagaan kelompok yang masih terbatas dalam hal koordinasi, komunikasi, dan pembagian peran. Kondisi ini menyebabkan kegiatan kelompok lebih sering berjalan ketika difasilitasi pihak luar, seperti penyuluh atau lembaga pendamping. Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan manajemen kelompok, pembagian tugas yang jelas, serta penyediaan insentif sederhana bagi anggota aktif,

misalnya dalam bentuk akses prioritas terhadap bantuan pemerintah atau hasil kelompok.

Di sisi lain, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Tekanan pembukaan lahan baru dari masyarakat sekitar yang belum tergabung dalam kelompok serta praktik konversi lahan untuk pertanian intensif menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kawasan hutan. Fluktuasi harga pasar hasil hutan, khususnya komoditas seperti jagung dan jambu mete, turut memperlemah motivasi anggota karena pendapatan yang diperoleh tidak selalu stabil. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah memperluas jaringan pasar melalui kemitraan dengan koperasi, pelaku usaha, atau lembaga pemasaran alternatif. Selain itu, penerapan diversifikasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta pengembangan produk olahan bernilai tambah dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Upaya ini perlu diperkuat dengan regulasi pemerintah daerah untuk melindungi kawasan hutan dari alih fungsi lahan yang berlebihan, sekaligus mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan ekologi.

3. Peran Pemerintah dan Lembaga

Peran pemerintah dan lembaga dalam mendukung keberlanjutan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) telah memberikan kontribusi penting, terutama pada aspek pengetahuan pengelolaan hutan dan konservasi. Kehadiran penyuluh kehutanan serta lembaga terkait telah membantu kelompok tani dalam memahami pentingnya menjaga tutupan hutan, teknik konservasi, dan tata kelola kawasan yang lebih berkelanjutan. Dukungan ini menjadi pondasi awal yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hutan bukan hanya sumber kayu, tetapi juga aset jangka panjang yang harus dijaga bersama. Meski demikian, bentuk dukungan yang diberikan masih lebih dominan pada aspek edukasi teknis, sementara dukungan pada aspek ekonomi dan kelembagaan belum sepenuhnya optimal.

Ke depan, masyarakat berharap adanya bantuan yang lebih komprehensif terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi. Bantuan modal usaha sangat dibutuhkan agar anggota dapat mengembangkan hasil hutan non-kayu maupun pertanian yang bernilai jual tinggi. Selain itu, perlu adanya fasilitasi akses pasar yang lebih luas, baik melalui penguatan jaringan dengan koperasi, kerja sama dengan sektor swasta, maupun promosi produk hasil hutan melalui program pemerintah daerah. Pelatihan pengelolaan hasil hutan yang berorientasi pada nilai tambah ekonomi, seperti pengolahan jambu mete, madu, atau produk olahan lainnya, menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan masyarakat, diharapkan program HKm dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ganda, baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan HKm terutama terletak pada aspek regulasi, pendampingan teknis, dan fasilitasi program. Melalui dinas terkait, pemerintah telah menyediakan penyuluh kehutanan, sosialisasi aturan, serta pendampingan konservasi dan tata kelola kawasan. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran strategis dalam penyediaan anggaran dan program bantuan, misalnya dalam bentuk bibit tanaman kehutanan, sarana pendukung, serta fasilitasi akses perizinan. Namun, dukungan pemerintah masih sering bersifat proyek jangka pendek dan belum berkesinambungan, sehingga kelembagaan kelompok tani masih lemah dalam mengelola program secara mandiri.

Sementara itu, peran lembaga non-pemerintah seperti LSM, koperasi, maupun pihak swasta lebih banyak difokuskan pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas ekonomi. LSM biasanya terlibat dalam pendampingan advokasi, pemberian pelatihan pengelolaan hasil hutan non-kayu, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih inklusif. Koperasi dan swasta memiliki peluang besar dalam memperluas akses pasar produk hasil hutan dengan sistem kemitraan yang lebih adil, misalnya melalui pembelian hasil olahan jambu mete atau madu dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan adanya sinergi antara pemerintah yang menguatkan aspek regulasi dan konservasi, serta lembaga non-pemerintah yang memperkuat aspek kelembagaan dan ekonomi, keberlanjutan HKM dapat tercapai secara lebih seimbang.

4. Simpulan

Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHKM) di Desa Kapita menunjukkan hasil yang cukup positif dari berbagai aspek. Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat tergolong tinggi, terutama di antara anggota yang tidak merantau. Keterlibatan aktif terlihat pada berbagai kegiatan pengelolaan kawasan saat musim hujan serta dalam pemeliharaan dan panen hasil hutan bukan kayu (HHBK) di musim kemarau. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian anggota yang kurang aktif, yang umumnya disebabkan oleh keterbatasan waktu atau keterlibatan dalam kegiatan lain di luar program.

Dari aspek ekonomi, program PHKM terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggota, terutama melalui hasil hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Dukungan berupa akses pasar dan pelatihan turut memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperluas jaringan pemasaran serta meningkatkan akses modal agar manfaat ekonomi yang diperoleh dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek ekologi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi hutan cukup baik. Hal ini tercermin dari kegiatan penanaman berbagai jenis kayu serta usaha menjaga tutupan hutan di wilayah desa. Meski begitu, kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan guna menjamin keberlanjutan ekologi dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penilaian, indeks gabungan keberlanjutan menunjukkan skor rata-rata 3,64 untuk aspek sosial, 3,5 untuk aspek ekonomi, dan 3,69 untuk aspek ekologi. Nilai-nilai tersebut menempatkan program PHKM di Desa Kapita dalam kategori “cukup berkelanjutan hingga berkelanjutan”, dengan potensi perbaikan terutama pada aspek ekonomi.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan program ini ke depan antara lain sebagai berikut:

- a. Penguatan partisipasi masyarakat, dengan mendorong keterlibatan anggota yang kurang aktif melalui pemberian insentif atau pembagian tugas yang lebih fleksibel sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu mereka.
- b. Peningkatan akses pasar dan modal, melalui perluasan jaringan pemasaran, pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota, serta fasilitasi akses permodalan agar usaha HHBK dapat terus berkembang secara berkelanjutan.
- c. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dengan melakukan pemantauan tutupan hutan secara rutin, mengembangkan kegiatan konservasi yang

melibatkan masyarakat secara langsung, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi.

- d. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga pendukung, agar dukungan teknis dan kebijakan yang diberikan dapat memperkuat efektivitas serta arah pengembangan program PHKM di masa mendatang.

5. Daftar Pustaka

- Andayani, N., Suryanto, P., & Kartodihardjo, H. (2020). *Evaluasi Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Indikator Ekologis*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 17(1), 45–60. Fakultas Kehutanan, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ditjen PSKL KLHK. (2022). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
- FAO. (2021). *Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- Fitriani, Y., & Hidayat, S. (2021). *Kinerja Sosial Ekonomi dan Ekologis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kalimantan Tengah*. Jurnal Ilmu Kehutanan, 15(2), 78–90. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Bogor.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Sixth Assessment Report (AR6): Synthesis Report*. IPCC. Secretariat, Geneva.
- Lestari, D., & Hamzah, A. (2021). *Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Degradasi Hutan di Kabupaten Jeneponto*. Jurnal Lingkungan dan Kehutanan, 13(1), 32–45. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Maryudi, A., & Krott, M. (2018). *Power in Community-Based Forest Management: The Politics of Devolution in Indonesia*. Forest Policy and Economics, 90, 32–39. Elsevier, Amsterdam.
- Nugroho, B. A., Setiawan, Y., & Riyanto, B. (2019). *Penguatan Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Jawa Tengah*. Jurnal Kebijakan Kehutanan, 13(3), 201–218. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Bogor.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Ramadhan, F., & Nugraha, R. (2021). *Hambatan Koordinasi dalam Implementasi Program PHKM di Sulawesi Tenggara*. Jurnal Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 11(1), 25–36. Fakultas Kehutanan, Universitas Halu Oleo, Kendari.
- Rosita, I., & Kurniawan, T. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program PHKM di Daerah Rawan Sosial Ekologis*. Jurnal Analisis Kebijakan Lingkungan, 14(2), 85–97. Fakultas Kehutanan, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Safitri, M., Sari, R. F., & Nuraini, R. (2020). *Permasalahan Akses dan Kapasitas dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan, 5(1), 17–30. Elsevier, Amsterdam.
- Sari, A. P., Nugroho, R. N., & Wahyuni, D. (2023). *Evaluasi Keberlanjutan Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Kabupaten Pasuruan*. Jurnal Ilmu Kehutanan, 17(1), 45–58.
- Subarudi, & Herawati, T. (2022). *Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Program*

- PHKM: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Perencanaan Kehutanan, 16(2), 51–65. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Bogor.
- Suwarno, A., Idrus, A., & Wahyuni, S. (2019). *Analisis Keberlanjutan PHKM di NTB: Perspektif Sosial-Ekologis*. Jurnal Sains Kehutanan Tropis, 11(1), 63–75. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press. Oxford.
- Wulandari, C., & Inoue, M. (2018). *The Importance of Social Capital in Collaborative Forest Management in Indonesia*. Forest Policy and Economics, 90, 144–154. Springer, Dordrecht.
- Yustika, A. E. (2020). *Aspek Ekonomi vs Ekologi dalam Implementasi PHKM: Studi Kasus di Pulau Jawa*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Lingkungan, 18(3), 91–104. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim, Bogor.